



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

DIMENSI-DIMENSI OTONOMI DAERAH

Memperdebatkan Wacana Otonomi dalam Birokrasi Pemerintah Desa
Doddy S. Singgih

Paradigma Kualitas dalam Manajemen Publik
Falih Suaedi

**Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah:
Kasus Kabupaten Blitar**
Bagong Suyanto

Desentralisasi dan Pembangunan: Sebuah Perdebatan
Kacung Marijan

**Persepsi Masyarakat Petani Miskin Mengenai Kesejahteraan Keluarga:
Studi Komunitas di Desa Tunggun Jagir, Kec. Mantup, Kab. Lamongan**
Benny Soembodo

**Resistensi Terhadap Perubahan pada Masyarakat Pulau Madura
dan Kepulauannya**
Fendy Suhariadi dan Budi Setiawan

**Ekowisata Sebagai Alternatif Pengembangan Potensi Daerah
di Era Otonomi**
Sri Endah Nurhidayati

**Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil
di Indonesia di Era Otonomi Daerah**
Roestoto Hartojoputro

**Resensi Buku:
Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan,
Strategi dan Peluang**
Karnaji

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum
Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum
I. Basis Susilo

Penanggungjawab
Kris Nugroho

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosebroto (Unair)
Ramlan Surbakti (Unair)
Daniel Theodore Sparringa (Unair)
Mohtar Mas'ood (UGM)
Ashadi Siregar (UGM)
Herudjati Purwoko (Undip)
Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi
Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi
Harijono

Redaksi Pelaksana
Bagong Suyanto
Yuyun Wahyu Izzati
Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran
Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia
Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Meskipun tema utama Dimensi-Dimensi Otonomi Daerah merupakan tema yang seringkali dibahas, dan coba diimplementasikan di berbagai kota maupun kabupaten. Namun, tidak sedikit perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi apa dan bagaimana otonomi daerah itu terkesan berlebihan. Bagi kota atau kabupaten yang kaya baik sumber alam dan potensi daerah, dengan adanya otonomi, mengeruk keuntungan secara ekonomis bagi kebutuhan daerah merupakan target utama, setelah beberapa tahun semenjak orde baru menjadi "penonton" pembangunan dan rela menjadi "sapi perah" bagi pemerintah pusat, bahkan ada beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat sebagai bentuk *euphoria* semenjak dibukanya keran otonomi. Sementara bagi daerah minus baik sumber dan potensi daerah pemberlakuan otonomi merupakan pukulan yang cukup berat, terutama dalam hal pengaturan perimbangan keuangan dan kekuasaan.

Untuk menelaah lebih jauh, jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* edisi Nomor 2 (April) 2004 sengaja mengupas permasalahan Otonomi Daerah berikut dimensi-dimensinya baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Berikut beberapa tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini: Analisis mengenai perdebatan otonomi seperti tulisan Memperdebatkan Wacana Otonomi dalam Birokrasi Pemerintah Desa disajikan oleh Doddy S. Singgih. Dalam hal manajemen kupasan Falih Suaedi tentang Paradigma Kualitas dalam Manajemen Publik patut menjadi bahan pertimbangan. Contoh hasil implementasi otonomi dalam tulisan Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah: Kasus Kabupaten Blitar oleh Bagong Suyanto. Desentralisasi dan Pembangunan: Sebuah Perdebatan dijelaskan Kacung Marijan. Benny Soembodo mengetengahkan Persepsi Masyarakat Petani Miskin Mengenai Kesejahteraan Keluarga. Dari kacamata psikologi Fendy Suhariadi dan Budi Setiawan mencoba memberikan pendapatnya dalam Resistensi terhadap Perubahan pada Masyarakat Pulau Madura dan Kepulauannya. Telaah pariwisata dalam otonomi dijelaskan secara panjang lebar oleh Sri Endah Nurhidayati yaitu Ekowisata sebagai Alternatif Pengembangan Potensi Daerah di Era Otonomi, serta Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil di Indonesia di Era Otonomi Daerah disajikan oleh Roestoto Hartojoputro. Tak kalah pentingnya bahan resensi buku: Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang diuraikan oleh Karnaji.

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif dalam memahami dinamika masyarakat yang sedang berkembang.

Tim Redaksi

Topik Utama Edisi No. 3 (Juli) 2004:
Indonesia Memasuki Pemilu Putaran I

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Memperdebatkan Wacana Otonomi dalam Birokrasi Pemerintah Desa

Doddy S. Singgih

1

Paradigma Kualitas dalam Manajemen Publik

Falih Suaedi

13

Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah:

Kasus Kabupaten Blitar

Bagong Suyanto

25

Desentralisasi dan Pembangunan: Sebuah Perdebatan

Kacung Marijan

45

Persepsi Masyarakat Petani Miskin Mengenai Kesejahteraan Keluarga: Studi Komunitas di Desa Tunggun Jagir, Kec. Mantup, Kab. Lamongan

Benny Soembodo

59

Resistensi Terhadap Perubahan pada Masyarakat Pulau Madura dan Kepulauannya

Fendy Suhariadi dan Budi Setiawan

69

**Ekowisata Sebagai Alternatif Pengembangan Potensi Daerah
di Era Otonomi**

Sri Endah Nurhidayati

81

**Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil
di Indonesia di Era Otonomi Daerah**

Roestoto Hartojoputro

95

Resensi Buku:

**Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan,
Strategi dan Peluang**

Karnaji

105

RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN PADA MASYARAKAT PULAU MADURA DAN KEPULAUANNYA

Fendy Suhariadi dan Budi Setiawan

Dosen Fakultas Psikologi Unair

Abstract

The purpose of this study is to uncover the level of resistance of society in Madura and its surrounding islands. Two hundred respondents were purposively selected from the regency of Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan as a sample. They were interviewed using resistance to change questions adapted from Antonio Giangreco's. The study yielded majority of the society in Madura had moderate attitude toward changes. Yet, 34.5 % of the respondents considered as resistance toward changes. There were only 20 % of the respondents supportive to the changes.

Keywords: resistance, society's changes, Madura

Terhitung sejak Juli 1997, serentetan krisis yang melanda Indonesia bukan cuma menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam, harga barang dan kebutuhan pokok melambung, kemampuan memproduksi pabrik menurun, dan terjadi gelombang PHK di berbagai sektor industri, tetapi juga menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin yang sangat tajam. Tingkat kemiskinan yang semula mengalami perbaikan dan mendekati angka 20 juta, ternyata kemudian melonjak beberapa kali lipat kembali akibat munculnya orang-orang miskin baru sehingga tercatat sampai dengan tahun 2003 menjadi 38,4 juta jiwa (Jusuf Kalla dalam Kompas, 2003).

Menurut *World Bank* diperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 14,1% pada tahun 1999 atau ekuivalen dengan munculnya 29 juta penduduk miskin baru dan pada tahun 2003 ini sudah mendekati angka 20% (Kompas, Juni 2003). Kelompok masyarakat yang diperkirakan paling terpuak dengan adanya situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah mereka yang termasuk kelompok masyarakat yang tidak stabil, mudah tergeser, rapuh, miskin, dan jauh dari jangkauan pembangunan. Kelompok inilah yang lazim disebut massa rentan, kelompok marginal atau masyarakat miskin.

Pemerintah sendiri sebenarnya

bukan bersikap lepas tangan terhadap berbagai kesulitan yang dialami masyarakat akibat situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain melakukan upaya koordinasi program-program penghapusan kemiskinan melalui GERDU TASKIN, secara khusus pemerintah melalui dana bantuan Bank Dunia juga telah mengucurkan sejumlah besar dana untuk Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang pada intinya bertujuan untuk mencegah agar masyarakat miskin tidak makin terpuruk. Namun, ibarat penyakit kronis, biang terjadinya situasi krisis yang berkepanjangan tampaknya tetap nyaris tak tersentuh, atau bahkan tidak pernah atau tidak mampu untuk disentuh. Untuk tahun 1999/2000 dan 2000/2001, salah satu fokus dari Program GERDU TASKIN adalah diarahkan kepada upaya pengembangan dan percepatan pengentasan kemiskinan di daerah pantai dan wilayah pedesaan lain pada umumnya. Kenapa daerah pantai dinilai perlu untuk diprioritaskan? Sebab dari berbagai kajian dan pengamatan disadari bahwa dibandingkan daerah lain, imbas situasi krisis yang terjadi di daerah pantai secara umum lebih terasakan. Seperti dikatakan Menteri Pertanian RI (10 Juli 1999) dan Deputy Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Otonomi Daerah dan Kawasan Regional, Bambang Bintoro (Kompas, 2003) bahwa di daerah pantai sebagian besar masyarakatnya umumnya hidup di lingkungan dengan kondisi perumahan, prasarana dan fasilitas lingkungan yang kurang memadai. Di samping itu, pendapatan masyarakat nelayan umumnya miskin, terutama yang termasuk dalam kriteria ini adalah: (1) nelayan buruh pada usaha penangkapan ikan dengan menggunakan perahu tanpa

motor atau motor tempel, (2) nelayan yang secara langsung melakukan usaha penangkapan ikan sendiri tanpa menggunakan perahu atau dengan perahu jukung, (3) buruh tani pada usaha budidaya ikan dengan teknologi sederhana, (4) petani ikan berlahan sempit, (5) petani ikan dan buruh tani yang berada di sekitar tambak dan pantai, dan (6) pengolah atau wanita tani nelayan sederhana.

Persoalannya kemudian: apakah berbagai bantuan yang telah dikucurkan pemerintah kepada masyarakat nelayan dan masyarakat pedesaan lain itu memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan? Faktor sosial dan budaya masyarakat acapkali banyak disebut-sebut berbagai kalangan ikut menjadi sebab, atau setidaknya berkaitan secara signifikan, dengan perilaku warga masyarakat dalam melakukan pembangunan. Secara teoritik antara lain bisa dikemukakan bahwa keberhasilan suatu masyarakat memperbaiki diri menuju ke arah perbaikan kualitas hidupnya tidak saja ditentukan oleh stimulasi modalitas ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh modalitas sosial dan budayanya. Misalnya, bagaimana orang memandang pembangunan, untuk apa pembangunan dilakukan, siapa yang menurut warga bertanggungjawab melakukan pembangunan, nilai-nilai lokal apasaja yang seiring dan atau tidak seiring, secara teoritik banyak mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pembangunan antara lain dimaksudkan untuk melakukan percepatan perubahan melalui intervensi kebijakan program kepada masyarakat. Persoalannya, intervensi program pembangunan (kalau itu dari atas, negara) acapkali tidak selalu seiring dengan nilai-

nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, tujuan pembangunan sebagaimana dikehendaki akan banyak mengalami gangguan, tidak lancar. Pola pembangunan seperti ini sudah mulai ditinggalkan seiring dengan bergantinya rezim orde baru ke rezim reformasi yang lebih mengedepan partisipasi dari masyarakat. Namun, program dari atas yang problematik dalam persoalan partisipasi publik sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata tidak segera teratasi meskipun masyarakat telah diberikan kesempatan untuk merancang-bangun program pembangunannya dari bawah. Sebab, pemahaman dan kesiapan masyarakat untuk semangat otonomi dan atau desentralisasi pun juga belum terlalu siap melaksanakannya.

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka sangat penting dan mendesak dilakukan upaya pemahaman terhadap karakteristik sosial dan budaya masyarakat Madura, khususnya berkaitan dengan pembangunan. Untuk itu, berikut dikemukakan hasil temuan awal hasil wawancara dan atau identifikasi umum dari kondisi sosial dan budaya masyarakat Madura berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan. Program pembangunan apapun akan menjadi sia-sia jika tidak mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya. Di masyarakat Madura misalnya, kondisi sosial-budaya masyarakat Madura sangat khas. Secara filosofis, model struktur sosial budaya masyarakat bersifat *komunalitas-segregatif* yang mendasarkan pada tingkat kekerabatan yang sangat kuat dengan menempatkan seorang tokoh yang berdimensi religi. Dengan demikian budaya mereka bersifat *paternalistik*. Adanya penilaian negatif

dari sebagian orang yang menganggap bahwa orang Madura itu kasar, menempuh segala cara untuk keuntungan pribadi, sukar diatur dan sebagainya adalah sebagai salah satu bentuk protes dari akumulasi ketidaksetujuan dan ketidaksepahaman terhadap kebijakan negara yang kurang bermanfaat bagi mereka. Disamping itu, selama ini ada kesan bahwa kebijakan pembangunan justru menimbulkan polarisasi di masyarakat komunal itu sendiri. Masyarakat yang berada di luar komunitas tadi justru seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat komunal yang paternalistik. Akibatnya keberadaan mereka selalu dicurigai.

Dengan demikian transformasi sosial di masyarakat Madura belum berjalan dengan semestinya. Akibatnya masyarakat begitu mudah terpancing isu-isu yang justru berasal dari tokoh-tokoh diluar komunitas lokal. Dengan melihat kondisi yang khas dari masyarakat Madura tersebut, maka persoalan utama yang harus diantisipasi oleh Propinsi Jawa Timur untuk memberdayakan masyarakat Madura di tahun-tahun mendatang bukanlah pembangunan fisik yang menafikan keberadaan kondisi sosial-budaya mereka, karena telah diketahui bersama bahwa keberhasilan sebuah upaya untuk membantu suatu masyarakat dari kemiskinan akan sangat tergantung pada bagaimana sikap masyarakat terhadap upaya tersebut. Bantuan dari berbagai pihak tanpa sikap positif dari masyarakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan akan menyebabkan gagalnya upaya itu. Tentu akan jauh berbeda bila masyarakat tersebut mempunyai sikap yang positif dimana masyarakat akan bersikap terbuka atas gagasan perubahan

dan keterlibatan sepenuhnya pada upaya perealisasi gagasan tersebut. Penerimaan dan keterlibatan yang dilandasi sikap dari dalam diri sendiri akan melahirkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan bila lahir dari keterpaksaan atau dibawah tekanan.

Penerimaan masyarakat atas suatu upaya pengentasan kemiskinan pada dasarnya adalah sikap masyarakat terhadap perubahan. Karena upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya merupakan sebuah proses perubahan, yaitu perubahan dari situasi yang penuh kekurangan menjadi situasi yang lebih berkecukupan. Sikap masyarakat ini dipengaruhi oleh seberapa besar resistensi masyarakat atas perubahan yang terjadi. Resistensi terhadap perubahan adalah perilaku ketidaksetujuan terhadap sebuah proses perubahan dimana individu merasa tidak senang atau tidak setuju atau tidak terbiasa berdasarkan penilaian personal atau kelompok. Resistensi ini bertujuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh sang pelaku (baik individu maupun komunitas) tanpa mengeliminir jalannya perubahan secara luas (Giangreco, 2002:14). Masyarakat yang mempunyai resistensi yang besar terhadap perubahan akan berusaha memperlambat atau menggagalkan perubahan dengan perilaku yang tidak langsung, terselubung dan mempunyai tingkat resiko yang kecil hingga sedang (Giangreco, 2002:15). Sehingga semakin tinggi tingkat resistensi suatu masyarakat, maka akan semakin sulit masyarakat tersebut menerima dan mendukung adanya perubahan. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat resistensi maka akan menyebabkan masyarakat menjadi terbuka atas gagasan baru dan mendukung realisasi gagasan itu.

Permasalahan

Masalah yang hendak dikaji dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana sikap Masyarakat Madura (baik di desa pantai maupun di desa pertanian) terhadap perubahan?
2. Pada daerah Madura yang mana terjadi penolakan terhadap perubahan yang akan terjadi?

Metode

Studi ini pada dasarnya tidak bermaksud mengkaji dan memusatkan masalah pada dampak sosial apa yang timbul dan dialami keluarga miskin di daerah pertanian dan pantai selama situasi krisis, melainkan yang lebih ditonjolkan justru adalah mencoba mengkaji sikap Masyarakat Madura (baik di desa pantai maupun di desa pertanian) terhadap perubahan. Walaupun terjadi sikap penolakan terhadap perubahan, itu terjadi pada daerah Madura tertentu saja. Lokasi penelitian ini secara *purposive*, ditetapkan di Pulau dan Kepulauan Madura. Sudah barang tentu, tidak semua daerah di wilayah Pulau dan Kepulauan Madura diteliti, tetapi hanya diambil 3 pulau yang sekiranya mewakili karakter masyarakat miskin di desa pantai dan desa pertanian di Madura. Disamping di daratan Pulau Madura yaitu di Kecamatan Socah-Bangkalan, Kecamatan Ketapang-Sampang dan Kecamatan Tlanakan-Pamekasan, studi ini dilakukan di Pulau Sapudi (Sumenep), Pulau Kangean (Sumenep) dan Mamburit (Sumenep). Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 200 responden. Para responden ini dipilih secara *purposive sampling* (Reaves, 1992) yang berarti bahwa responden (KK) diambil atas dasar

kriteria tertentu sesuai dengan tujuan studi yang telah ditetapkan. Secara rinci, kriteria responden penelitian ini adalah: (1) sudah menikah dan memiliki anak, (2) merupakan keluarga miskin menurut aparat setempat (3) tidak harus berbentuk keluarga inti, dan (4) tinggal di daerah penelitian.

Dari 200 Kepala Keluarga yang diambil sebagai sampel itu, semuanya diwawancarai dengan menggunakan perangkat kuesioner yang telah disusun rapi sebelum penelitian di lapangan. Namun demikian, ada 20 orang Kepala Keluarga — diasumsikan dapat mewakili setiap jenis karakteristik masyarakat — yang secara khusus telah diwawancarai secara mendalam (*in depth*) yang dipilih berdasarkan atas kebutuhan data mendalam dan atas pertimbangan relevansi permasalahan utama. Alat ukur yang digunakan adalah kuisisioner *resistance to change* yang diadaptasi dari Antonio Giangreco. Kuisisioner yang terdiri dari 13 item ini mengukur 4 dimensi dari resistensi terhadap perubahan, yaitu:

- a. Perilaku yang menyatakan ketundukan secara personal terhadap perubahan
- b. Perilaku yang mempromosikan dan memfasilitasi perubahan yang dilakukan orang lain
- c. Perilaku yang menampakan ketidaknyamanan terhadap perubahan
- d. Perilaku yang mendukung dan memantapkan ketidaksetujuan orang lain terhadap perubahan

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, setelah melalui proses editing dan klasifikasi kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Sebelum dianalisis dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur terlebih dahulu, uji validitas dengan menggunakan

analisis butir dan reliabilitas dengan teknik alpha cronbach. Setelah uji validitas dan reliabilitas, data dianalisis dengan membuat norma terlebih dahulu dengan menggunakan persentil. Pembuatan norma untuk menentukan kriteria pro-perubahan, moderat, dan anti perubahan. Berdasarkan pada norma tersebut, data dianalisis dengan menggunakan diskripsi atas persentase jumlah responden yang masuk dalam kategori pro-perubahan, moderat, dan anti perubahan.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Uji Statistik

Hasil uji validitas alat ukur dengan menggunakan teknik analisis butir adalah dengan mengkorelasikan tiap-tiap item dengan skor total, untuk itu perhitungannya menggunakan korelasi Pearson. Korelasi Pearson digunakan untuk menghitung korelasi data kuantitatif dengan skala interval dan rasio (Kerlinger, 1986). Sedangkan jenis data yang dihasilkan oleh kuesioner ini adalah data interval, sehingga analisis validitas item menggunakan teknik korelasi Pearson. Uji validitas dari 13 item menghasilkan 11 item yang valid, yaitu item nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sedangkan item 7 dan 13 gugur. Indeks korelasi item yang valid bergerak antara 0,154 sampai dengan 0,514. Item-item yang sudah valid ini kemudian diuji reliabilitasnya dengan metode *one shot* atau diukur sekali saja dengan membandingkan koefisien alpha atau r hasil dengan r tabel dengan dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika r alpha positif dan r alpha $>$ r tabel, maka butir atau variabel tersebut reliabel.
- b. Jika r alpha positif dan r alpha $<$ r tabel,

maka butir atau variabel tersebut tidak reliabel.

Penghitungan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, dari 11 item yang sudah valid diperoleh 6 item yang valid dan reliabel, yaitu item nomer 1, 2, 3, 8, 10, dan 12. Sedangkan item nomer 4, 5, 6, 9, dan 11 tidak cukup reliabel untuk mengukur variabel. Tahap kedua, item-item yang sudah valid dan reliabel dianalisis ulang untuk mengetahui koefisien alpha. Berdasarkan analisis tahap kedua ini diperoleh koefisien alpha atau r hasil 0,5799, angka ini lebih besar dari r tabel untuk df 198 dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,0910. Hasil perbandingan r alpha atau r hasil dengan r tabel ($0,5799 > 0,0910$) yang berarti keenam item (1, 2, 3, 8, 10, dan 12) sudah cukup valid dan reliabel untuk mengukur variabel dalam penelitian ini.

Ke enam item ini yang digunakan untuk mengukur sikap responden terhadap perubahan yang selengkapanya sebagai berikut:

Data yang diperoleh dari item yang valid diatas, diolah untuk membuat norma kelompok dengan menggunakan *persentile*. Norma ini akan mengklasifikasikan responden ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Pro Perubahan dengan skor total 6 sampai dengan 8
Individu pada kategori ini mempunyai pikiran yang terbuka atas gagasan baru dan bersedia mengikuti perubahan yang terjadi. Ia menunjukkan perilaku yang mempromosikan dan memfasilitasi sebuah perubahan yang dilakukan oleh orang lain.
- b. Moderat dengan skor total 9 sampai dengan 12
Pada kategori ini, individu cenderung diam/menunggu apabila ada orang lain yang melakukan perubahan. Ia akan secara hati-hati memperhitungkan resiko yang harus ditanggung sebagai dampak dari perubahan tersebut. Apabila menguntungkan maka Ia akan mendukung tetapi bila tidak akan acuh atau membiarkan perubahan tersebut.

TABEL 1. ITEM YANG VALID & RELIABEL

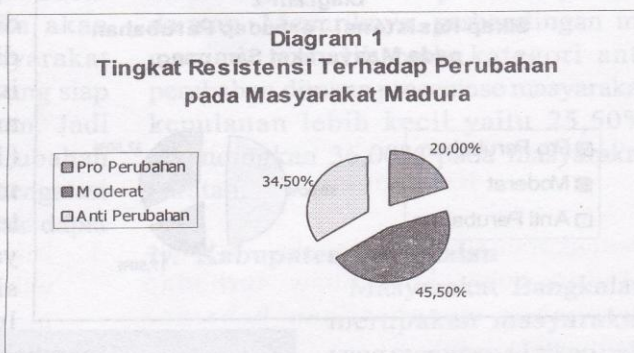
No.	Item
1	Saya menyambut perubahan dengan penuh semangat
2	Saya melakukan upaya secara sungguh-sungguh sehingga bawahan saya/ anggota keluarga dapat memahami perubahan
3	Saya akan mendukung sepenuh hati bila ada sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan rencana perubahan
4	Saya merasa terganggu bila orang-orang/masyarakat membicarakan perubahan
5	Saya setuju dengan saudara/teman/anggota keluarga lain yang menentang perubahan
6	Saya merasa kurang nyaman bila anggota keluarga saya membicarakan perubahan

- c. Anti Perubahan dengan skor total 13 sampai dengan 15

Individu ini merasa tidak nyaman bila melihat atau mendengar tentang adanya perubahan. Ia menunjukkan perilaku yang mendukung dan memantapkan ketidaksetujuan orang lain terhadap perubahan.

Data pengklasifikasian responden ini dapat dilihat di lampiran. Setelah pengklasifikasian responden ini, analisis dilanjutkan dengan melihat prosentase responden berdasarkan kategori dan berdasarkan kabupaten.

bersikap resisten terhadap perubahan yang terjadi selama ini. Sedangkan sisanya sebesar 20,00% masuk dalam kategori pro perubahan yang menunjukkan mereka selama ini menerima, mempromosikan dan memfasilitasi perubahan yang ada.



2. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil pengolahan data di atas, kemudian dilakukan analisa atas sejumlah responden yang masuk pada kategori pro-perubahan, moderat, ataupun anti perubahan. Pembahasan pertama secara umum atas jumlah 200 responden. Dari hasil tersebut dinyatakan pada penjelasan di bawah.

a. Berdasarkan Kategori

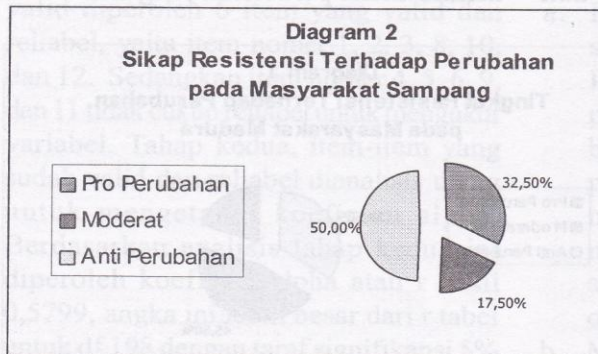
Ternyata dari 200 jawaban responden secara umum menunjukkan suatu indikasi bahwa sebagian besar responden bersikap moderat terhadap perubahan yaitu sebesar 45,50% (Lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram 1). Responden pada kategori ini dapat menerima perubahan selama mereka mengetahui mengenai perubahan tersebut dan menilai dirinya mampu melakukannya. Bagian terbesar kedua dari responden terlingkup dalam kategori anti perubahan yaitu 34,50%. Ini menunjukkan mereka merasa tidak nyaman dan cenderung

b. Berdasarkan Kabupaten

i. Kabupaten Sampang

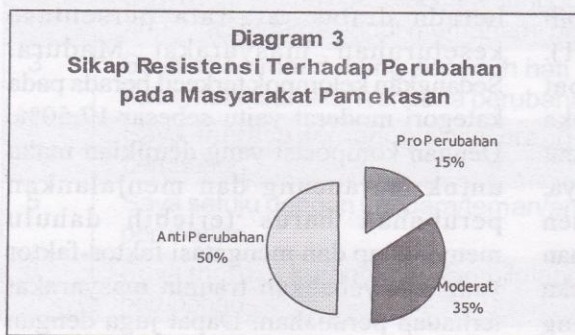
Pada masyarakat Sampang, sebagian besar masyarakat masuk dalam kategori anti perubahan yaitu sebesar 50,00% (lebih jelas dapat dilihat pada diagram 2). Diduga ada beberapa peristiwa pada masa yang lalu yang membentuk sikap yang resisten terhadap perubahan pada sebagian besar masyarakat Sampang. Menariknya mereka yang termasuk dalam kategori pro perubahan juga cukup besar, yaitu 32,50% yang berada diatas rata-rata persentase keseluruhan masyarakat Madura. Sedangkan kelompok terkecil berada pada kategori moderat yaitu sebesar 17,50%. Dengan komposisi yang demikian maka untuk merancang dan menjalankan perubahan harus terlebih dahulu menyingkap dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan trauma masyarakat terhadap perubahan. Dapat juga dengan

memanfaatkan mereka secara potensial menerima perubahan sebagai pelopor dalam merancang dan menjalankan perubahan karena jumlah mereka cukup besar di Sampang.



ii. Kabupaten Pamekasan

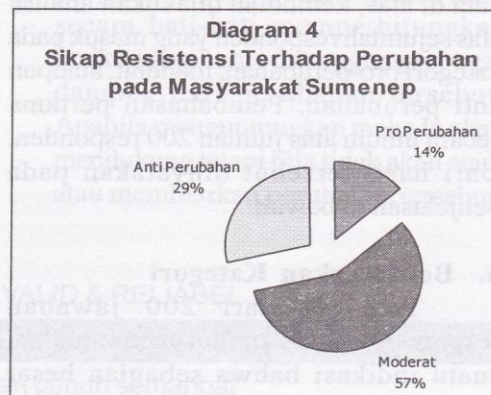
Hasil yang serupa dengan masyarakat Sampang ditemui juga pada masyarakat Pamekasan. Sebagian besar masyarakat Pamekasan tercakup dalam kategori anti perubahan. Tetapi kedua masyarakat itu berbeda pada komposisi dua kategori lainnya. Apabila pada masyarakat Sampang kategori pro perubahan lebih besar dari kategori moderat maka pada masyarakat Pamekasan yang berada pada kategori moderat lebih besar yaitu 35,00% dibandingkan yang pro perubahan yaitu



15,00% (untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram 3). Hasil yang demikian menunjukkan tantangan terbesar dalam melakukan perubahan berada pada masyarakat Pamekasan. Karena selain

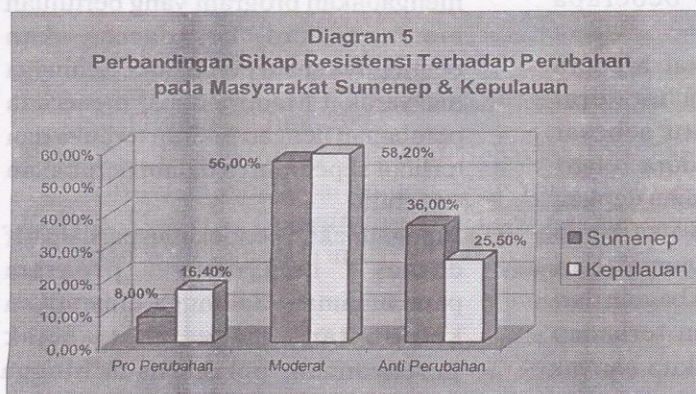
masyarakat yang merasa kurang nyaman dengan perubahan demikian besar (50,00%), juga disebabkan kurangnya persentase individu yang potensial untuk menjadi pelopor dalam perubahan (15,00%). Sehingga sebelum menjalankan perubahan harus terlebih dahulu melakukan kegiatan yang berorientasi pada perubahan sikap masyarakat agar menjadi lebih terbuka dan mendukung perubahan situasi menjadi lebih baik.

iii. Kabupaten Sumenep



Sikap Masyarakat Sumenep terhadap perubahan mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan masyarakat pada dua kabupaten sebelumnya. Mereka sebagian besar tercakup dalam kategori moderat yaitu sebesar 57,44% (untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram 4). Bagian masyarakat yang cukup hati-hati berhitung resiko tetapi masih tetap

cukup terbuka atas perubahan. Bagian terbesar kedua dari Masyarakat Pamekasan masuk dalam kategori anti perubahan yaitu sebesar 28,77%. Sedangkan sisanya sebesar 13,79% masuk dalam kategori pro perubahan. Sehingga walau sebagian besar masyarakatnya cukup terbuka akan perubahan tetapi diduga masyarakat Sumenep kekurangan individu yang siap menjadi pelopor dari perubahan. Jadi kemauan untuk melakukan perubahan masih kekurangan energi dalam mengatasi tantangan dari mereka yang tidak dapat menerima perubahan.



Lebih jauh lagi, apabila membandingkan masyarakat Sumenep daratan dengan masyarakat yang berada di kepulauan maka didapatkan hasil bahwa masyarakat Sumenep kepulauan lebih terbuka dalam menerima perubahan.

Masyarakat kepulauan mempunyai presentasi yang lebih tinggi pada dua buah kategori yaitu pro perubahan dan moderat dibandingkan masyarakat Sumenep daratan (lihat pada diagram 5). Masyarakat kepulauan yang masuk pada

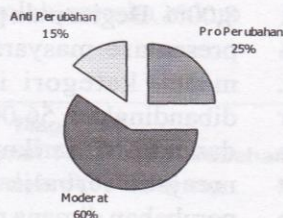
kategori pro perubahan terdapat 16,40% lebih besar dibandingkan masyarakat daratan yang tercakup yaitu sebesar 8,00%. Begitu pula pada kategori moderat, presentase masyarakat kepulauan yang masuk kategori ini sebesar 58,20% dibandingkan 56,00% pada masyarakat daratan. Menariknya, perbandingan ini menjadi terbalik pada kategori anti perubahan dimana presentase masyarakat kepulauan lebih kecil yaitu 25,50% dibandingkan 36,00% pada masyarakat daratan.

iv. Kabupaten Bangkalan

Masyarakat Bangkalan merupakan masyarakat yang mempunyai sikap paling positif terhadap perubahan. Mereka yang masuk dalam ketegori moderat mencapai 60% dari keseluruhan (untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram 6). Sedangkan mereka yang tercakup dalam kategori pro perubahan sebesar 25,00% yang lebih besar dibandingkan persentase mereka yang tercakup dalam kategori anti perubahan yaitu 15,00%.

Berbicara mengenai perubahan, persoalan yang dihadapi bukanlah pada sikap bersedia atau tidak bersedia tetapi lebih pada persoalan pengetahuan dan kemampuan dalam merancang dan menjalankan perubahan yang diinginkan. Sehingga program yang disarankan adalah program yang bersifat langsung dan konkret.

Diagram 6
Sikap Resistensi Terhadap Perubahan
pada Masyarakat Bangkalan



Kesimpulan

Pengukuran sikap masyarakat di Pulau Madura dan kepulauan terhadap perubahan menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat Madura mempunyai sikap yang moderat terhadap perubahan yaitu sebesar 45,50%. Masyarakat Madura relatif bersedia menerima perubahan dengan perhitungan yang hati-hati atas resiko yang mungkin menjadi dampak dari perubahan tersebut. Tetapi bagian dari masyarakat yang resisten terhadap perubahan juga masih cukup banyak yaitu sebesar 34,50%. Sedangkan mereka yang bersedia mendukung perubahan hanya sebesar 20,00%.
2. Masyarakat kabupaten Bangkalan merupakan masyarakat yang paling bersedia menerima dan mendukung perubahan dibandingkan masyarakat 3 (tiga) kabupaten lainnya. Selain banyak yang bersikap moderat terhadap perubahan (60,00%) masyarakat Bangkalan juga cukup banyak memiliki individu yang sedia mendukung perubahan (25,00%). Disusul kemudian oleh masyarakat kabupaten Sumenep yang cukup

moderat menerima perubahan (57,44%). Sedangkan sebagian besar masyarakat Sampang dan Pamekasan cenderung bersikap konservatif dan menolak perubahan (50,00%).

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat disarankan kepada beberapa

pihak terkait (pemerintah daerah, dan pusat) bahwa:

1. Bila hendak melakukan perubahan di wilayah pulau Madura terlebih dulu mengadakan program yang bertujuan memunculkan kesadaran akan pentingnya suatu perubahan. Sehingga masyarakat Madura dapat menerima perubahan dengan pikiran terbuka dan terlibat sepenuhnya dalam perubahan tersebut.
2. Menggunakan pendekatan partisipatif dalam menyusun program pembangunan. Sehingga diharapkan ketelibatan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program akan melahirkan perasaan memiliki atas perubahan yang berjalan.
3. Melakukan sosialisasi dan persuasi atas suatu program yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini perlu dilakukan di awal proses perubahan karena tingkatan resistensi pertama adalah berkaitan dengan ketidaktahuan. Sehingga diharapkan dengan adanya pemberian informasi dan fakta yang dilakukan dengan baik maka reaksi penolakan tersebut relatif dapat diatasi.
4. Mengadakan pelatihan yang bertujuan

untuk mempersiapkan dan mengembangkan kompetensi individu yang berkaitan langsung dengan suatu program perubahan. Hal ini perlu

dilakukan untuk mempersiapkan individu serta mencegah penolakan individu yang disebabkan karena faktor ketidakmampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Giangreco. *Conceptualisation and Operationalisation of Resistance to Change*, (<http://www.biblio.liuc.it/biblio/liucpap/pdf/>, 2002).
- _____. *Angka Kemiskinan Tetap Tinggi: Penanggulangannya Cenderung Tumpang Tindih*, Pikiran Rakyat edisi Kamis 30 Juli 2003.
- _____. *Dampak Krisis Ekonomi pada Kemiskinan*, Business News edisi 14 Juli, 2003.
- _____. *Kemiskinan di Jawa Timur, Kenapa Meningkat?*, Kompas edisi Senin 2 Juni 2003.
- _____. *Rasio Kemiskinan Mandek pada Angka 16 Persen*, Kompa edisi Kamis 4 Desember 2003.
- _____. *Target Orang Miskin 2004 Tak Akan Berhasil Dicapai*, Kompas edisi Kamis 19 Juni, 2003
- Kerlinger, N. Fred. *Foundation of Behavioral Research*, 3rd edition, (Holt Rinehart Winston International Edition, New York, 1986).
- Reaves, C. Celia, *Quantitative Research for the Behavioral Sciences*, (Singapore: John Willey and son inc, 1992).

Era otonomi merupakan tonggak perkembangan pembangunan yang cukup penting di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 10 dengan jelas disebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayah masing-masing dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan

kata lain, daerah berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Hal ini yang mendorong daerah untuk berkarya-jomba mengembangkan potensi yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada di wilayah masing-masing. Menurut WTO, industri ini pariwisata masih tercatat sebagai industri terbesar dan tercepat mengalami pertumbuhan. Tercatat pengaliran di bidang pariwisata pada tahun 2000 mencapai US \$ 2 miliar, dan juga